

KETERLIBATAN PARA TOKOH MUSLIMAT NU
CAB. INDRAMAYU DALAM PKB
(STUDI HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN PEREMPUAN
DALAM POLITIK)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM PIDANA ISLAM DAN POLITIK ISLAM

Oleh :

TUTI ALAWIYAH

NIM : 9637 2558

DI BAWAH BIMBINGAN:

1. Dr. H. SYAMSUL ANWAR, MA
2. FATMA AMILIA, S.Ag

JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2001

MILIK PERPUSTAKAAN IAIN	
Nomor :	1185 /Th:02
Tanggal :	19-1-2002

ABSTRAK

Peran serta dan keterlibatan perempuan dalam dunia politik sekarang ini tidaklah asing. Dalam organisasi-organisasi politik dapat dilihat keterlibatan mereka, baik secara langsung dalam kepengurusan inti maupun dalam keanggotaan biasa. Namun demikian masih ada perdebatan menyangkut peran dan kiprah perempuan dalam perjalanan bangsa serta perkembangan zaman. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya berbagai macam pendapat ulama khususnya di kalangan ulama NU terhadap keterlibatan para tokoh Muslimat NU dalam partai politik.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dan bersifat kualitatif, dengan menggunakan pendekatan normative. Metode pengumpulan datanya melalui interview dan literer, dan dalam menganalisis data dari hasil penelitian digunakan metode induktif.

Para tokoh Muslimat NU mengikuti pendapat mayoritas di kalangan PBNU yang memberi kesempatan pada Muslimat NU untuk tampil di sektor public bagi mereka yang merasa mempunyai kemampuan. Partisipasi aktif dalam organisasi politik PKB yang dilakukan para tokoh Muslimat NU Cab. Indramayu merupakan keterlibatan secara individual bukan secara organisatoris, walaupun PKB bukan satu-satunya partai yang lahir dari NU tetapi mereka lebih cenderung memilih PKB sebagai parta pilihan mereka.

Key word: Muslimat NU, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), politik

Dr. H. Syamsul Anwar, MA
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

LAMP : 4 Eksemplar
HAL : Skripsi
Sdri. Tuti Alawiyah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di-
Yogyakarta

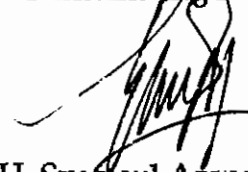
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberikan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara Tuti Alawiyah yang berjudul **KETERLIBATAN PARA TOKOH MUSLIMAT NU CAB. INDRAMAYU DALAM PKB (STUDI HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN PEREMPUAN DALAM POLITIK)**, maka dengan ini kami dapat menyetujui untuk segera diuji skripsi ini di depan sidang munaqasyah dalam waktu secepat mungkin.

Wassamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Ramadhan 1422 H
06 Desember 2001 M

Pembimbing I



Dr. H. Syamsul Anwar, MA
Nip: 150 215 881

Fatma Amilia, S.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

LAMP : 4 Eksemplar
HAL : Skripsi
Sdri. Tuti Alawiyah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di-
Yogyakarta


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberikan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara Tuti Alawiyah yang berjudul **KETERLIBATAN PARA TOKOH MUSLIMAT NU CAB. INDRAMAYU DALAM PKB (STUDI HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN PEREMPUAN DALAM POLITIK)**, maka dengan ini kami dapat menyetujui untuk segera diuji skripsi ini di depan sidang munaqasyah dalam waktu secepat mungkin.

Wassamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Ramadhan 1422 H
06 Desember 2001 M

Pembimbing II

 Fatma Amilia, S.Ag
Nip: 150 277 618

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:
**KETERLIBATAN PARA TOKOH MUSLIMAT NU
CAB. INDRAMAYU DALAM PKB
(STUDI HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN PEREMPUAN
DALAM POLITIK)**
Disusun Oleh:

TUTI ALAWIYAH
NIM. 96372558

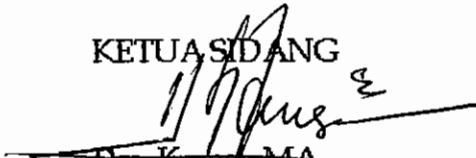
telah dimunaqasyahkan di depan Sidang Munaqasyah pada tanggal 27
Desember 2001 M/12 Syawal 1422 H, dan dinyatakan telah dapat
diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam
Hukum Pidana Islam dan Politik Islam.

Yogyakarta, 31 Desember 2001 M
15 Syawal 1422 H

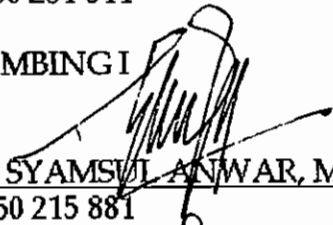


PANITIA MUNAQASYAH

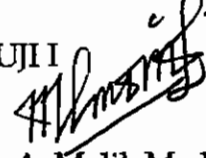
KETUA SIDANG


Drs. Kamsil, MA
NIP. 150 231 514

PEMBIMBING I


DR. H. SYAMSUL ANWAR, MA
NIP. 150 215 881

PENGUJI I


Drs. H. A. Malik Madaniy, MA
NIP. 190 182 698

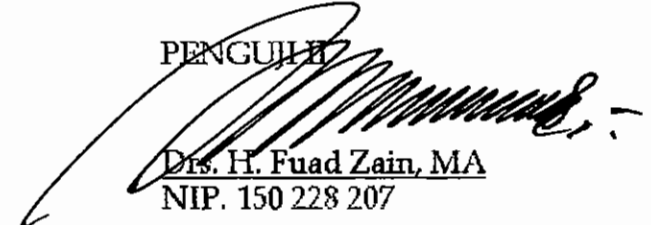
SEKRETARIS SIDANG


Drs. Malik Ibrahim
NIP. 150 260 056

PEMBIMBING II

 Fatma Amilia, S. Ag
NIP. 150 277 618

PENGUJI II


Drs. H. Fuad Zain, MA
NIP. 150 228 207

TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada transliterasi Arab Latin, berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal, 22 Januari 1998, Nomor: 0543. b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal.

Daftar huruf dan transliterasi dengan huruf Latin sebagai berikut:

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	KETERANGAN
ا	Alif	-	Tidak Dilambangkan
ب	Ba'	B
ت	Ta'	T
ث	Tsa'	Ṣ	ṣ (titik di atas)
ج	Jim	J
ح	Ha'	Ḥ	ḥ (titik di bawah)
خ	Kha'	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	Ẓ	ẓ (titik di atas)
ر	Ra'	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy

ص	Ṣad	Ṣ	ṣ (titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	ḍ (titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	ṭ (titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	ẓ (titik di bawah)
ع	'Ain	ﺀ	(koma di atas terbalik)
غ	Ghain	G
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Wau	W
ه	Ha'	H
ء	Hamzah	ﺀ	Apostrof
ي	Ya'	Y

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap karenanya syaddah ditulis rangkap

متعقدين

ditulis muta'qqidin

عدة

ditulis iddah

II. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h

هبة ditulis hibah

جزية ditulis jizyah

ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t.

روضة الاطفال ditulis raudatul atfal atau raudah al-atfal

زكاة الفطر ditulis zakatul fitri atau zakatu al-fitri

IV. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	Fathah	A
ِ	Kasrah	I
ُ	Dommah	U

V. Vokal Panjang

1. Fathah + Alif, ditulis a

جاهلية ditulis Jahiliyyah

2. Fathah + Ya mati, ditulis a

يسعى ditulis yas'a

3. Kasrah + ya mati, ditulis i

مجید

ditulis majid

4. Dammah + wawu mati, ditulis u

فروض

ditulis furud

VI. Vokal Rangkap

1. Fathah + Ya mali, ditulis ai

بینکم

ditulis bainakum

2. Fathah + Wawu mati, ditulis au

قول

ditulis gaul

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dsalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

أَنْتُمْ

ditulis a'antum

لئن شکر تم

ditulis la'in syakartum

VIII. Kata Sandang = AI = alif + lam

a. Diikuti huruf Syamsiyah

Huruf "L" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut. Contoh:

الشمس

ditulis asy-syamsu

النهر

ditulis an-nahru

b. Diikuti oleh huruf Qamariyah

Huruf "L" tetap, tanpa perubahan sesuai dengan bunyi. Contoh:

القمر

ditulis al-qamaru

الأرض

ditulis al-ardu

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Puji syukur ke hadirat Ilahi Rabbi Yang Maha Rahuman dan Rahim, yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin sehingga terselesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada Rasulullah, para keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejaknya.

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu penyusun ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah
2. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, MA selaku pembimbing I, atas waktu dan tenaga yang telah diberikan untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Fatma Amilia, S.Ag selaku pembimbing II, atas berbagai masukan, saran dan kritikan yang telah disampaikan.
4. Abah dan Emak yang telah memberikan kasih sayang dan bimbingannya dengan tulus dan ikhlas serta memberikan bantuan

baik secara materiil maupun immateril yang tidak dapat saya balas dengan apapun.

5. Suamiku tercinta bang Zhem , yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan dengan penuh kesabaran selama penulisan skripsi ini.

Akuinya kepada Allah SWT penyusun panjatkan do'a, semoga segala bantuan baik itu bantuan moril maupun materiil dari semua pihak mendapatkan balasan yang terbaik dari sisi Allah SWT. Dan harapan penyusun semoga skripsi ini bermanfaat bagi semuanya.

Yogyakarta, 12 November 2001

Penyusun



Tuti Alawiyah
NIM: 9637 2558

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II PANDANGAN ULAMA TERHADAP	
KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM POLITIK.....	20
A. Pandangan Ulama yang Membolehkan Keterlibatan Perempuan dalam Politik	22
B. Pandangan Ulama yang Melarang Keterlibatan Perempuan dalam Politik	30
C. Peran Perempuan dalam Politik Menurut Perspektif Hukum Islam.....	33

BAB III: AKTIVITAS POLITIK PARA TOKOH MUSLIMAT

NU DALAM PKB DI KAB. INDRAMAYU

A. Gambaran Umum Muslimat NU Kab. Indramayu	39
1. Proses Historis Berdirinya Muslimat NU.....	39
2. Dasar Organisasi Muslimat NU.....	42
3. Tujuan Muslimat NU.....	43
B. Struktur Organisasi dan Program Kerja Pokok Bidang Muslimat	44
1. Struktur Organisasi.....	44
2. Program Kerja Pokok Bidang Muslimat NU	45
a. Program Pokok Bidang Organisasi.....	46
b. Program Pokok Bidang Pendidikan/ Kader.....	47
c. Bidang Penerangan/Da'wah	47
d. Program Pokok Bidang Ekonomi/ Koperasi.....	48
e. Program Pokok Bidang Tenaga Kerja.....	49
f. Program Pokok Bidang Sosial, Kesehatan dan Lingkungan Hidup.....	50
C. Bentuk-bentuk Aktivitas Para Tokoh Muslimat NU dalam PKB	51

BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKTIVITAS

POLITIK PARA TOKOH MUSLIMAT NU

A. Kecenderungan Aktivitas Para Tokoh Muslimat NU

Cab. Indramayu Terhadap Fatwa Ulama tentang Peran Politik Perempuan.....	56
---	----

B. Kontribusi Aktivitas Politik Para Tokoh Muslimat

NU Terhadap Perkembangan Hukum Islam di Indonesia	64
--	----

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran-saran	75

DAFTAR PUSTAKA.....	77
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Terjemahan-terjemahan	I
Biografi Ulama dan Tokoh.....	III
Pedoman Wawancara	V
Surat Perijinan	VI
Biodata Penyusun	VIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Mungkinkah demokrasi tanpa keterlibatan perempuan?¹. Itulah pertanyaan yang selalu mengusik banyak kalangan dari dulu hingga sekarang. Selama ini perempuan benar-benar telah ditinggalkan dalam pembangunan yang berfokus utama pada manusia. Perempuan lebih banyak menjadi objek pembangunan dibanding subjek, bahkan peran serta dan keterlibatan perempuan selama ini seringkali hanya terhenti pada dataran konsep. Sulit untuk mengatakan bahwa perempuan diberi kesempatan yang adil untuk ikut ambil bagian dalam kehidupan politik.

Perempuan dan politik merupakan dua hal yang masih sulit dibayangkan terutama di negara-negara berkembang. Hal ini disebabkan manusia telah dibentuk oleh budayanya masing-masing yang menekankan bahwa kedudukan atau peranan perempuan berkisar dalam lingkungan keluarga seperti mengurus suami, mendidik anak-anak, memasak dan sebagainya yang berkaitan dengan urusan rumah tangga. Sedangkan politik yang digambarkan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan kekuasaan sejak dulu adalah bidang yang hampir selalu dikaitkan dengan dunia laki-laki dan seakan-akan *tabu* untuk

¹ Fadmi Sustiwi, "Demokrasi Tanpa Partisipasi Perempuan?". dalam *Kedaulatan Rakyat*, senin, 7 Juni 1999, hlm. 6

dinasuki oleh perempuan baik di masyarakat Timur maupun Barat. Selama berabad-abad mereka menempatkan perempuan di luar masalah-masalah yang berkaitan dengan politik dan kekuasaan.

Kedudukan perempuan yang demikian ternyata tidak dapat dipertahankan karena dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi pandangan yang meletakkan perempuan untuk terus menerus tersubordinasi dalam bidang sosial-ekonomi dan politik tidak dapat dipertahankan lagi, bahkan sekarang ini hampir semua negara modern di dunia ini telah memberikan lahan politik pada warga perempuannya meskipun proses pemberian hak tersebut tidak sama dalam merealisasikannya.²

Adanya perubahan-perubahan sosial-budaya yang telah terjadi sebagai akibat dari kemajuan teknologi dan berkembangnya ilmu pengetahuan tersebut secara tidak langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat secara mendasar. Hal ini juga dihadapi oleh para tokoh dalam organisasi Muslimat NU sebagai gerakan keagamaan yang dimaksudkan untuk membentuk tingkah laku manusia dengan nilai-nilai agama yang menjadi titik pandang dan titik pijak, senantiasa berhadapan dengan dua pilihan, di mana seharusnya kedua pilihan tersebut harus mampu dipadukan dan dicapai. Adapun dua pilihan yang dimaksud, keduanya sama-sama memberi akibat terhadap masing-

² Isbodroini Suyanto, "Peranan Sosialisasi Politik Terhadap Partisipasi Politik Perempuan", dalam T. O. Ihromi (ed.), *Kajian Wanita Dalam Pembangunan* (Jakarta: Yayasan Obor, 1995), hlm. 483

masing pilihan. Satu pilihan pertama yakni organisasi keagamaan yang tetap melestarikan kemurnian etika dan spiritual (nilai-nilai agama) sebagai inti gerakan sekaligus untuk membumikannya.³ Pilihan ini dengan resiko terbatasnya lingkungan pengaruhnya baik secara geografis maupun bidang garapannya. Sedangkan pilihan kedua, organisasi keagamaan mau tidak mau harus melepaskan sebagian nilai-nilai agama demi memberi pengaruh yang lebih luas dan kuat.⁴ Hal ini jelas tidak mungkin dilakukan oleh organisasi keagamaan.

Tantangan ini jelas amat mempengaruhi arah dan gerak organisasi keagamaan Islam. Terlebih dihadapkan pada perubahan sosial saat ini yang cenderung menimbulkan konflik-konflik yang kuat, sementara organisasi keagamaan justru harus mampu membumikan nilai-nilai ajaran agama secara luas tanpa harus meninggalkan ajaran-ajaran agama.

Dalam menentukan kehidupan berpolitik banyak dari tokoh Muslimat NU ini terjun langsung kedalam berbagai partai politik yang ada di Indonesia sekarang ini, sebagai contoh yaitu Partai Kebangkitan Bangsa. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tokoh Muslimat NU khususnya cabang Indramayu yang terlibat dalam partai tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung.

³ Elizabeth K Nottingham, *Agama dan Masyarakat: Suatu Pengantar Sosiologi Agama*, terj. Abdul Muis Naharong (ed.) (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), hlm. 145

⁴ *Ibid.*, hlm. 146

Partai Kebangkitan Bangsa sebagai salah satu partai terbesar khususnya di Kabupaten Indramayu dalam pemilihan umum tahun 1999 yang telah lalu, tentulah di dalam mewujudkan visi dan misi partai membentuk suatu program kerja baik itu program kerja untuk jangka pendek maupun program kerja untuk jangka panjang. Adapun dalam pelaksanaan program kerja tersebut tidak terlepas dari peran aktif para tokoh Muslimat NU. Bagi para tokoh Muslimat NU yang terlibat langsung dalam kepengurusan partai, mereka dituntut untuk berperan aktif dalam berbagai jenis aktivitas yang dilakukan partai, walaupun keberadaan mereka mempunyai jumlah minoritas dalam kepengurusan partai tetapi hal tersebut tidak menghalangi mereka untuk memberikan aspirasinya demi memajukan partai.

Memang tidak bisa dipungkiri bahwa dalam dunia politik bias gender masih sangat kental khususnya di berbagai organisasi politik sehingga perempuan di satu sisi mengalami dilematis. Apakah kesemua ini berangkat dari ketidakmampuan perempuan untuk berlomba secara obyektif dengan laki-laki ataukah domestikasi perempuan itu sendiri yang berangkat dari asumsi teologis bahwa perempuan memang diciptakan lebih rendah dari laki-laki sehingga sepantasnya laki-laki mendominasi perempuan?⁵

⁵ Yunahar Ilyas, *Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al-qur'an Klasik Dan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 2

Peran serta dan keterlibatan perempuan dalam dunia politik sekarang ini tidaklah asing lagi bagi kita. Dalam organisasi-organisasi politik kita dapat melihat keterlibatan mereka, baik itu secara langsung terlibat dalam kepengurusan inti maupun dalam keanggotaan biasa, namun demikian masih ada saja perdebatan menyangkut peran dan kiprah perempuan dalam perjalanan bangsa serta perkembangan zaman.

Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya berbagai macam pendapat ulama khususnya di kalangan ulama NU sendiri terhadap keterlibatan para tokoh Muslimat NU dalam partai politik. Sebagian *fuqaha'* juga memberikan dukungan terhadap keterlibatan perempuan dalam politik, jika hal itu memang bisa mendatangkan kemaslahatan yang nyata bagi umat, walaupun sebagian *fuqaha'* juga ada yang melarang kaum perempuan untuk mendapatkan hak politiknya dengan alasan bentuk penciptaan fisik dan naluri perempuan.

Islam sendiri memberi perhatian yang besar terhadap kehidupan perempuan dalam segala bidang kehidupan, bahkan al-Qur'an sendiri telah mengabadikan nama seorang perempuan yang mampu memimpin kaumnya dengan akal dan hikmah, yang pada saat-saat kritis dapat membawa kaumnya kepada kebaikan di dunia maupun di akhirat, dia adalah ratu Saba' yang bernama *Balqis*. Dijelaskan dalam al-Qur'an bagaimana rakyatnya yang kuat perkasa menyerahkan semua urusan mereka kepada ratu Saba', agar dia sendiri mengambil keputusan.⁶

⁶ Yusuf Al-Qaradawy, *Fiqh Daulah Dalam Perspektif al-Qur'an dan as-Sunnah*, terj. Kathur Suhardi (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hlm. 238

قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa terkadang, seorang perempuanpun memiliki kecerdikan, ketajaman berfikir dan kajiluan dalam berpendapat, pandai mengatur pemerintahan dan masih banyak lainnya yang tidak dimiliki oleh sekian banyak laki-laki. Hal ini telah menunjukkan kepada kita bahwa keterlibatan perempuan dalam politik tidaklah bertentangan dengan al-Qur'an.

Sejauh ini posisi perempuan dalam dunia politik dapat dikatakan belum cukup strategis. Hal ini dapat kita lihat pada setiap institusi formal perempuan selalu minoritas (*marginal*) dalam menempati politik formal. Namun demikian hal ini bukan berarti perempuan tidak mempunyai hak untuk memberikan hak politiknya dalam institusi formal, mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki yang menempati posisi mayoritas dalam institusi formal. Tidak ada satupun undang-undang di Indonesia yang secara formal membedakan laki-laki dan perempuan, bahkan UUD 1945 dalam pasal 27 mengatakan bahwa semua orang berkedudukan sama di depan hukum.

Sebagai manusia, kaum perempuan sama halnya dengan kaum laki-laki yaitu dituntut untuk dapat menegakkan agamanya, berda'wah dan melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*. Selagi perempuan itu

⁷ An-Naml (27): 33

mempunyai kemampuan dan kemauan untuk ikut andil dalam membangun bangsa dan terjun dalam dunia politik itu bukanlah merupakan larangan baginya, selagi hal itu dapat mendatangkan maslahat bagi umat. Pada masa ketika Rasulullah belum diutus kaum perempuan tidak mendapatkan hak apa-apa bahkan mereka diperlakukan tidaklah lebih dari sebuah barang dagangan, mereka tidak hanya diperbudak tetapi dapat diwariskan sebagai harta benda. Sejarah telah membuktikan bahwa kedatangan Rasulullah telah merubah kebiasaan-kebiasaan tersebut, di mana perempuan juga mempunyai hak untuk menentukan pilihannya. Bahkan suara pertama yang membenarkan dan mendukung beliau adalah suara perempuan yaitu Khadijah r.a.⁸

Kehidupan politik demokratis dan ekonomi modern, baik kapitalis maupun sosialis, telah membangkitkan kesadaran baru tentang hak-hak perempuan. Perempuan tidak dapat lagi diperlakukan sebagai anggota masyarakat kelas dua, sebagaimana yang terjadi dalam masyarakat-masyarakat feodal. Mereka benar-benar menolak diperlakukan sebagai hak milik laki-laki, mereka bahkan menolak dianggap berstatus sosial yang lebih rendah dari laki-laki. Mereka

⁸ Yusuf Al-Qaradawy, *Fiqh*, hlm. 228

menuntut, demikianlah seharusnya kesetaraan dengan laki-laki dalam segala bidang.⁹

B. Pokok Masalah

Dengan uraian latar belakang masalah di atas, penyusun tertarik untuk meneliti dan mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana sebenarnya keterlibatan para tokoh Muslimat NU cabang Indramayu dalam politik khususnya dalam Partai Kebangkitan Bangsa. Agar masalah ini tidak melebar yang nantinya akan keluar dari tujuan penulisan, maka penyusun mengangkat pokok-pokok masalah yang akan di bahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kecenderungan aktivitas para tokoh Muslimat NU cab. Indramayu terhadap fatwa para ulama tentang peran politik perempuan?
2. Bagaimana kontribusi aktivitas politik para tokoh Muslimat NU terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian yang akan penyusun lakukan adalah untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah tersebut yaitu;

⁹ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*. alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm.ix

1. Tujuan penelitian:

- a. Memberikan kepastian hukum tentang keterlibatan perempuan dalam politik.
- b. Untuk menjelaskan aktivitas apa saja yang dilakukan oleh para tokoh Muslimat NU dalam politik pada PKB di Kab. Indramayu.

2. Kegunaan penelitian:

- a. memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka kontekstualisasi ajaran-ajaran al-Qur'an sesuai dengan tuntutan zaman tanpa harus teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pada dunia keilmuan meninggalkan pegangan tekstual agar berfungsi efektif sebagai petunjuk bagi umat Islam pada umumnya dan dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran kaum perempuan pada khususnya.
- b. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara teoritis dan praktis. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pada dunia keilmuan dan secara praktis diharapkan dapat memberi manfaat bagi Muslimat NU khususnya dan masyarakat Indramayu pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Dengan melihat latar belakang masalah yang ada, di era kekinian perempuan telah banyak mengalami perubahan dalam berbagai bidang

kehidupan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah peradaban manusia, perempuan mendapatkan peluang bahkan dorongan untuk mengurangi tugas yang harus di emban oleh badannya. Perempuan kini bisa ikut andil dalam membatasi jumlah anak yang dititipkan dalam rahimnya.¹⁰ Berkurangnya beban fisik perempuan untuk mengandung dan melahirkan selama masa produktifnya tentulah memberi peluang bagi perempuan untuk produktif di berbagai bidang yang lain termasuk bidang politik.

Dalam Islam sendiri tidak ada halangan bagi kaum perempuan untuk memasuki berbagai bidang profesi sesuai dengan keahliannya, seperti menjadi guru, menteri, hakim dan lainnya. Bahkan jika ia mampu dan sanggup boleh menjadi perdana menteri atau kepala negara asal dalam tugasnya tetap memperhatikan hukum-hukum atau aturan-aturan yang ditetapkan oleh Islam.

Adapun dalam penulisan skripsi ini penyusun di samping terjun di lapangan, penyusun juga merujuk pada buku-buku yang bertema seputar gender dan masalah perempuan. Di antaranya, DR. Mansour Fakih dalam bukunya *Analisis Gender dan Transformasi sosial*. Buku ini mencoba menyajikan secara sederhana apa sebenarnya analisis gender, sebagai teori tugas utama analisis gender adalah memberi makna, konsepsi, asumsi, ideologi dan praktik hubungan baru antara kaum laki-

¹⁰. Marwah Daud Ibrahim, *Teknologi Emansipasi dan Transendensi* (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 133

laki dan perempuan serta implikasinya terhadap kehidupan sosial yang lebih luas (sosial, ekonomi, politik, kultural).

Hj. Bainar (ed.) dalam bukunya *Wacana Perempuan dalam Keindonesiaan dan Kemodernan*. Buku ini memotret bagaimana wacana gerakan perempuan berhadapan dengan dilema yang terjadi antara pergulatan keindonesiaan yang bercirikan keulunya cita rasa budaya tradisionisme yang semakin gencar yang ditandai globalisasi kehidupan.

Dadang S. Anshori dkk (ed.) dalam buku *Membincangkan Feminisme*. Buku ini merekam banyak pemikiran kaum perempuan dari sudut dan latar belakang yang berbeda tentang dunianya; pemikiran-pemikiran perempuan yang tidak bias oleh dominasi laki-laki. Saat ini, semakin diperlukan perspektif perempuan tentang dirinya berdasarkan kematangan intelektualnya. Untuk itu, buku ini disajikan dalam wacana yang sangat feminis dan feminim.

Asghar Ali Engineer dalam buku *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*. Buku ini berisi tentang penafsiran hak-hak perempuan dalam Islam yang telah lama mengalami penyalah-artian dan kesalahpahaman kaum fundamental, tanpa menghiraukan kontek sosial yang terdapat di dalam ayat-ayat al-Qur'an tentang subyek tertulis, telah berusaha untuk melukiskan laki-laki sebagai makhluk yang superior terhadap perempuan. Buku ini berusaha mengartikan kembali hak-hak perempuan yang sesuai

dengan jiwa al-Qur'an yang sesungguhnya, yaitu memberikan hak yang setara terhadap laki-laki dan perempuan dan tidak mendiskriminasikan di antara mereka dalam menghargai pribadi, demokrasi dan hak-hak manusia.

PP. Muslimat NU dalam buku *50 Tahun Muslimat NU Berkhidmat Untuk Agama, Negara dan Bangsa*. Buku ini berisi tentang ikhtisar sejarah dan perkembangan Muslimat NU.

PP. Muslimat NU dalam buku *Keputusan Kongres XIII Muslimat Nahdlatul Ulama*, buku ini memuat hasil keputusan-keputusan dalam kongres antara lain masalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) juga program-program kerja pokok bidang Muslimat.

Dengan melihat kepada acuan di atas, penyusun belum melihat adanya pembahasan secara spesifik tentang keterlibatan para tokoh Muslimat NU dalam partai politik khususnya dalam PKB di Kabupaten Indramayu. Dalam buku-buku di atas lebih terfokus pada latar belakang sejarah dan perkembangan Muslimat NU secara organisasi, namun belum ada yang membahas tentang keterlibatan langsung para tokoh Muslimat NU tersebut dalam partai politik pada masa sekarang ini, sehingga penyusun merasa perlu untuk mengetengahkan tema ini sebagai sebuah karya ilmiah.

E. Kerangka Teoretik

Islam adalah agama universal, agama penyerahan yang menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia di muka bumi. Ajaran Islam mengandung nilai-nilai universal yang menjadi petunjuk bagi kehidupan dulu, sekarang dan yang akan datang. Nilai-nilai tersebut antara lain nilai kemanusiaan, kesetaraan dan keadilan Islam tidak pernah membolehkan adanya perbedaan atau perlakuan diskriminasi diantara umat manusia. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya:

¹¹ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

Dari ayat tersebut jelas bahwa di dalam Islam tidak mengenal adanya perbedaan, hanya ketakwaanlah yang membedakan manusia satu dengan lainnya, Islam melihat manusia sebagai makhluk Allah SWT yang sejajar dan sederajat. Oleh karena itu sistem keagamaan yang diskriminatif yaitu hanya berdasarkan pada perbedaan ras, agama, gender dan sebagainya yang tidak punya relevansi dengan ajaran Islam tidak dapat dibenarkan.

Begitu pula dengan tampilnya kaum perempuan dalam dunia publik termasuk dalam bidang politik di masa kini bukanlah sebuah masalah yang harus diperdebatkan lagi, sebab Islam menempatkan

¹¹ Al-Hujurat (49): 13

perempuan dan laki-laki dalam kesetaraan bukan berdasarkan gender tetapi lebih pada kemaslahatan atau kebaikan bagi masyarakat karena adanya tanggungjawab yang sama dalam membina dan hidup bermasyarakat dengan sendirinya kaum perempuan juga memiliki hak-hak sebagaimana laki-laki.

Dalam sejarah Islam sendiri telah menceritakan bagaimana para istri Rasulullah juga sering terlibat dalam aktivitas publik, bahkan Rasulullah sendiri tidak pernah melarang istrinya untuk mengikuti kegiatan di luar rumah. Lebih dari itu, sejarah juga mencatat keberanian Aisyah menuntut pelacakan pembunuhan Utsman r.a serta terjun langsung memimpin pasukan dalam perang Jamal yang kontroversial itu.

Memang harus diakui ada budaya yang memperlemah peran perempuan di wilayah publik yang dianggap menyalahi kodratnya sebagai "orang rumah". Tetapi yang semacam ini bukanlah bersumber dari Islam. Pada tataran empirik kita dapat menyaksikan bagaiman nilai-nilai budaya di Timur Tengah tidak memberi kebebasan yang cukup berarti bagi kaum perempuan. Mereka benar-benar dilarang keluar rumah kecuali jika didampingi oleh suami atau mahramnya, dan walaupun pergi keluar, wajah mereka harus ditutup cadar, meski kita tahu bahwa sebagian *fuqaha'* seperti Imam asy-Syafi'i tidak melarang perempuan memperlihatkan wajahnya. Jadi, Islam yang diturunkan

sebagai rahmatan lil 'alamin tidak mungkin membedakan peran laki-laki dan perempuan dalam konteks ketidakadilan yang bias gender.¹²

Selain itu untuk menyerukan nilai-nilai yang tinggi supaya dapat dipertahankan terus kita juga harus meyakini bahwa tidak semua ulama melarang perempuan tampil dalam dunia publik terutama dalam bidang politik sebab sumber dari kelemahan perempuan sebenarnya hanya merupakan pandangan kultural pada masa lalu yakni, memposisikan kaum perempuan hanya sebagai teman di belakang laki-laki.

Pandangan yang berlaku di sebagian ulama yang menampik kehadiran kaum perempuan di pentas organisasi, karena alasan syar'i bahwa perempuan tidak diperbolehkan untuk keluar rumah apalagi untuk terjun dalam organisasi politik, jika hal itu diterapkan di masa sekarang tentu saja akan menimbulkan pertentangan di mana saat ini isu tentang kesetaraan gender sedang marak-maraknya dibicarakan.

Dalam catatan sejarah perkembangan hukum Islam sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang berbeda, boleh jadi suatu pendapat yang dulu ditolak tetapi di kemudian dapat diterima, karena dianggap relevan dengan kondisi sekarang dan mampu mendatangkan maslahat bagi umat manusia serta memenuhi keadilan. Dalam kaidah hukum disebutkan bahwa:

¹² H.A. Hasyim Muzadi, *Nahdlatul Ulama di Tengah Agenda Persoalan Bangsa* (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 77

لا يَنكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

Kaidah ini secara eksplisit memberikan legitimasi untuk melakukan revisi-revisi hukum yang sudah tidak relevan dengan kondisi atau zaman akibat perubahan waktu, tempat dan kondisi masyarakat. Namun demikian perubahan yang terjadi tidak boleh keluar dari kerangka maqasid asy-syari'ah.

Begitu juga dengan fenomena keterlibatan perempuan dalam politik, di mana dulu perempuan tidak mengenal dunia politik sama sekali, tetapi di era kekinian perempuan sudah akrab dengan dunia tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan, oleh karenanya analisis terhadap obyek ini adalah di dasarkan pada data-data dari lapangan dalam hal ini khususnya dari para tokoh Muslimat NU di kabupaten Indramayu.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, artinya bahwa data-data yang dipaparkan dari data yang ditemui penyusun dalam lapangan

¹³ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 444

tanpa adanya perhitungan secara kuantitatif, dan kemudian dianalisis sampai pada kesimpulan.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, Pendekatan ini dimaksudkan agar obyek studi dapat dianalisis dengan menggunakan kaidah-kaidah normatif Islam yang berkaitan dengan perempuan dan politik.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Interview

Interview adalah pengumpulan data dengan jalan tanya jawab langsung sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian,¹⁴ atau sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.

b. Literer

Disamping pengumpulan data lewat interview, penelitian ini juga mengumpulkan data literer yang sejalan dan searah dengan pembahasan ini.

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach* (Yogyakarta: Yayasan penerbit psikologi UGM, 1979), hlm. 193

5. Metode Analisa Data

Setelah data-data terkumpul, agar lebih dapat berarti maka data perlu dianalisis. Dalam menganalisis data dari hasil penelitian ini digunakan metode induktif, yaitu metode yang berusaha menetapkan berbagai rumusan atau kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang khusus, kemudian dari fakta-fakta yang khusus tersebut ditarik generalisasi yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penyusunan studi ini agar lebih mempermudah dan terarah dalam pembahasannya, maka penyusun mempergunakan sistematika sebagai berikut:

Pertama, pembahasan mengenai pendahuluan yang didalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, tela'ah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya untuk memperoleh gambaran tentang berbagai macam pendapat ulama terhadap keterlibatan para tokoh Muslimat dalam politik, maka dalam bab II akan kami paparkan beberapa pendapat ulama antara yang membolehkan dan yang melarang terhadap keterlibatan para tokoh Muslimat NU dalam politik. Dalam bab ini juga

penyusun berusaha memberikan analisis terhadap keterlibatan perempuan dalam politik.

Berikutnya adalah bab ketiga yang membahas tentang gambaran umum Muslimat NU yang meliputi sejarah berdirinya, dasar dan tujuan, struktur organisasi dan program kerja pokok bidang Muslimat, hal ini diketengahkan dengan maksud agar mengetahui sejauh mana peranan para tokoh Muslimat NU dalam organisasi. Dan untuk mengetahui aktivitas para tokoh Muslimat Nu dalam PKB maka dalam bab ini juga akan kami jelaskan bentuk-bentuk aktivitas para tokoh Muslimat NU dalam PKB.

Pada bab keempat penyusun akan menganalisis tentang aktivitas para tokoh Muslimat NU dalam politik menurut hukum Islam. Dalam bab ini akan kami uraikan mengenai kecenderungan aktivitas para tokoh Muslimat NU terhadap fatwa ulama tentang peran politik perempuan, apakah mereka mengikuti pendapat yang membolehkan atau yang melarang serta kontribusi aktivitas politik para tokoh Muslimat NU terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia:

Pembahasan dalam penyusunan studi ini akan diakhiri dengan penutup, yaitu bab kelima yang didalamnya berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dalam penulisan skripsi ini, kiranya dapat penyusun ambil beberapa kesimpulan, antara lain yaitu:

1. Ada beberapa pendapat di kalangan ulama terhadap keterlibatan perempuan dalam politik. Para tokoh Muslimat NU khususnya di Kabupaten Indramayu lebih sependapat pada aliran pemikiran pendapat ulama yang cenderung membolehkan terhadap aktivitas politik perempuan, sebab menurut mereka tidak ada larangan yang pasti dalam agama mengenai hal tersebut. Para tokoh Muslimat NU juga mengikuti pendapat mayoritas di kalangan PBNU yang memberi kesempatan pada Muslimat NU untuk tampil di sektor publik bagi mereka yang merasa mempunyai kemampuan.
2. Partisipasi aktif dalam organisasi politik PKB yang dilakukan oleh para tokoh Muslimat NU Cab. Indramayu merupakan keterlibatan atau partisipasi secara individual bukan secara organisatoris, walaupun PKB bukanlah satu-satunya partai yang lahir dari NU tetapi mereka lebih cenderung untuk memilih PKB sebagai partai pilihan mereka. Partisipasi para tokoh Muslimat NU Cab. Indramayu ini juga merupakan respon yang digerakkan oleh perasaan untuk

memperoleh dan sekaligus proaktif dalam menuntut persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Selama ini persamaan hak di antara laki-laki dan perempuan selalu dibicarakan, apalagi dengan munculnya peran gender dewasa ini setidaknya para tokoh Muslimat NU merasa dituntut untuk tampil bersama-sama dengan kaum laki-laki dalam sektor publik. Tampilnya para tokoh Muslimat NU untuk aktif dalam politik PKB merupakan wujud nyata dari keinginan mereka untuk dapat merealisasikan hak berpolitik yang mereka miliki, sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an bahwa seorang perempuanpun mempunyai hak untuk berpolitik.

Peran yang dilakukan oleh para tokoh Muslimat NU dalam politik PKB ini setidaknya telah memberikan wacana baru khususnya terhadap kaum perempuan, sekaligus menghilangkan pandangan bahwa seorang perempuan harus tinggal di rumah saja atau bekerja di ruang domestik. Sebaliknya mereka dituntut untuk dapat menjadi mitra yang baik bagi kaum laki-laki dalam sektor publik jika ia merasa mampu untuk melakukan hal tersebut dengan catatan tidak meninggalkan nilai-nilai ajaran Islam.

B. Saran-saran

1. Kajian kritis sangat diperlukan untuk mengakhiri bias dan dominasi laki-laki dalam penafsiran agama. Maka memberikan semangat dan

kesempatan kepada perempuan untuk mengembangkan ajaran agama yang tidak bias laki-laki juga diperlukan. Hal ini memungkinkan bagi perempuan untuk membuat, mengontrol dan menggunakan pengetahuan mereka sendiri.

2. Persoalan diskriminasi terhadap perempuan bukan hanya persoalan laki-laki, tetapi pola struktur dan sistem ketidakadilan masyarakat dan ketidakadilan gender, maka perlu usaha gerakan transformatif yang mendapatkan sistem hubungan laki-laki dan perempuan yang lebih adil yang meliputi hubungan ekonomi, budaya dan politik dan perlu juga peran aktif dalam organisasi.
3. Perlunya kaum perempuan menyadari bahwa sebenarnya kedudukan mereka dalam Islam sangat mulia, maka mereka tidak perlu merasa menjadi makhluk yang dinomorduakan.
4. Perlunya diadakan penelitian lanjutan untuk lebih dapat melihat perkembangan aktivitas para tokoh Muslimat NU dalam politik khususnya di Kabupaten Indramayu.

DAFTAR PUSTAKA

A. KELOMPOK AL-QUR'AN

Ilyas, Yunahar, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Kementrian Urusan Agama Islam Kerajaan Saudi, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Madinah: Muajmma Malik Fahd, 1998.

Shihab, Quraish, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1994.

B. AL-HADITS

Al-Bukhari, Abu Abdillah Ibn Ismail, *Matan Al-Bukhari*, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.

C. KELOMPOK FIQH

Abu Suqqah, Abdul Halim, *Tahrir Mar'ah Fi Ashri Ar-Risalah*, alih bahasa, Chairul Halim, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

Al-Qaradawy, Yusuf, *Fiqh Daulah dalam Perspektif Al Qur'an dan As-Sunnah*, Penerjemah, Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1998.

Arafah, Muh. bin Abdullah Sulaiman, *Huquq Mar'ah Fil Islam*, alih bahasa Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1994.

Jaiz, Hartono M., *Polemik Presiden Wanita dalam Tinjauan Islam*, Jakarta: Pustaka Kausar, 1998.

Marcoes-Natsir, Lies M, *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian tekstual dan Kontekstual*, Jakarta: INIS. 1993.

Sadzali, Munawir, *Ijtihad Kemarusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1997.

Shiddieqy, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993

D. KELOMPOK LAIN

Ali, Asghar Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.

- , *Teologi Pembebasan*, Alih Bahasa Agung P., Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Anshori, Dadang S. dkk (ed.), *Membincang Feminisme*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.
- Aula, Majalah NU No. 12 Th XX, Surabaya: Des, 1998.
- Bainar, Hj. (ed.). *Wacana Perempuan dalam Ke-Indonesiaan dan Kemodernan*, Yogyakarta: PT. Pustaka Cisendo, 1998.
- Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Psikologi UGM, 1979.
- Hasyim, Syafiq (ed.), *Menakar Harga Perempuan*, Bandung: Mizan, 1999.
- Ibrahim, Marwah Daud, *Teknologi Emansipasi dan Transendensi*, Bandung: Mizan, 1995.
- Ihromi, T.O, *Kajian Wanita Dalam Pembangunan*, Jakarta: Yayasan Ober, 1995.
- Jawa Pos*, Marjinalisasi Politik Perempuan, 1999.
- Kedaulatan Rakyat*, Demokrasi Tanpa Partisipasi Perempuan, 1999.
- Koentjaraningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia, 1997.
- Muslimat NU, PP., *Keputusan Kongres XIII Muslimat NU*, Jakarta: 1995.
- , *50 Tahun Muslimat NU Berkhidmat Untuk Agama, Negara dan Bangsa*, Jakarta: 1996.
- Muzadi, H.A. Hasyim, *Nahdlatul Ulama di Tengah Agenda Persoalan Bangsa*, Jakarta: Logos, 1999.
- Notingham, Elizabeth K., *Agama dan Masyarakat: Suatu Pengantar Sosiologi Agama*, Jakarta: Rajawali, 1985.
- Yatie, Ali, *Teologi Sosial: Tela'ah Kritis Persoalan Agama dan Kemamusiaan*, Yogyakarta: LKPSFM, 1997.

Lampiran I

TERJEMAHAN-TERJEMAHAN

HLM	FN	TERJEMAHAN
		BAB I
6	7	Mereka menjawab: "Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan (dia) juga memiliki keberanian yang sangat (dalam peperangan), dan keputusan berada ditanganmu. Maka pertimbangkanlah apa yang kamu perintahkan".
13	11	Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang-orang yang paling bertaqwa di antara kamu.
16	13	Tidaklah diingkari terjadi perubahan hukum lantaran perubahan masa
		BAB II
20	1	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita.
20	2	Tidak bahagia (sejahtera) suatu kaum, apabila mereka menyerahkan urusannya terhadap perempuan.
34	22	Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian yang lain, mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dalam mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
35	24	Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka

BAB IV		
59	4	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu, di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal
60	5	Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

1. Prof. T. M. Hasbi ash-Shiddieqy

Beliau dilahirkan di Loksmawe (Aceh utara) pada tanggal 10 Maret 1904, pernah mendalami pelajaran Islam di pondok pesantren selama lima belas tahun di daerah Sumatra. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di Jawa Timur di Perguruan Tinggi Al-Irsyad di Surabaya. Sejak inilah beliau giat dalam karya ilmiahnya yang berupa tulisan dalam bidang agama Islam.

Beliau pernah menjadi dekan dan dosen fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Banyak karya beliau yang terkenal, diantaranya: Pengantar Hukum Islam, Falsafah Hukum Islam, Ilmu Kenegaraan Dalam Fiqih Islam, Pengantar Hukum Muamalah dan lain-lainnya. Beliau wafat tahun 1975 dalam rangka naik haji di karantina haji Jakarta.

2. Imam al-Bukhari

Ulama penghimpun hadits yang lahir di Bukhara, sebagai seorang anak yatim piatu pada tahun 810 M. Ayahnya seorang ahli hadits yang ketika wafat banyak meninggalkan harta.

Ia dididik oleh ibunya dan mendapatkan pelajaran pertama dari ulama fiqh. Ketika berumur sepuluh tahun ia mulai menghafal hadits. Dialah yang pertama membedakan antara hadits shahih dan daif. Ia mengembalikan segala hadits kepada sanadnya, dan dialah yang menyusun kumpulan hadits shahih yang disebut dengan *Shahih Bukhari*.

Ia adalah Imam Mujtahid yang mempunyai pendapat sendiri, meskipun pada mulanya ia bermazhab Syafi'i. Beliau termasuk salah seorang dari enam pemuka ulama *Muhaddisin*. Ia meninggal dunia tahun 870 M.

3. Fatima Mernisi

Ia adalah seorang guru besar di Universitas Muhammad V Maroko, dimana beliau pernah mendapatkan pendidikan dibidang sosiologi dan politik. Beliau dilahirkan pada tahun 1940 di Qarawiyin dan mendapatkan pendidikan pertamanya di sekolah tradisional yang didirikan oleh kaum Nasionalis Maroko. Pada masa remajanya beliau aktif dalam menentang kolonialisme Prancis. Buku terkenalnya yang telah menempatkannya sejajar dengan penulis-penulis perempuan lain adalah *Beyond: Male-Female Dynamics Indonesia-Israel Modern Muslim Society*.

4. Riffat Hasan

Seorang feminis muslim kelahiran Lahore, Pakistan. Mendapatkan gelar Ph.D di bidang Filsafat dari University Durham, Inggris. Sejak tahun 1976 beliau tinggal di Amerika Serikat, menjabat sebagai ketua jurusan *Religious Of Study Program* di University Louisville, Kentucky. tahun 1986-1987 beliau menjadi dosen tamu di Dwinity School Harvard University, dimana beliau menulis bukunya yang berjudul "Equal Before Allah". Sejak tahun 1974 beliau mempelajari teks Al-Qur'an secara seksama dan melakukan interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an khususnya yang berhubungan dengan persoalan perempuan. beliau memberikan sumbangan besar terhadap gerakan perempuan di Pakistan.

Lampiran V

BIODATA PENYUSUN

Nama : Tuti Alawiyah
NIM : 96372558
Tempat, Tanggal Lahir : Anjatan, 01 Oktober 1977
Alamat Asal : Ds. Patrol Baru RT. 01/1
Kec. Sukra
Kab. Indramayu, Jawa Barat 45257

Nama Orang Tua:

Ayah : KH. A. Fudloly

Ibu : Hj. Masno'ah

Riwayat Pendidikan : Sekolah Dasar Negeri Patrol VI, lulus tahun
1990
: MTs NU "05" Sunan Katong Kaliwungu,
Kendal, lulus tahun 1993
: MAN Yogyakarta II, lulus tahun 1996
: Masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
tahun 1996 pada fakultas Syari'ah jurusan
Jinayah Siyasah